MIRACLE JOURNAL

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

# TEORI DAN APLIKASI ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALI KASIM KABUPATEN GAYO LUES

**Rafika Duri[1], Harapan Tua[2], Firman[3], Fina Friaska Amelia[4]**

[1234]Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
*e-mail:* rafika.duri1410@grad.unri.ac.id, harapan.tua@lecturer.unri.ac.id, firman1409@grad.unri.ac.id, finaffa@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori dan aplikasi administrasi publik dalam konteks pelayanan kesehatan, dengan mengambil studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ali Kasim, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan, mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait administrasi publik dan manajemen rumah sakit daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi teori administrasi publik modern, khususnya New Public Management (NPM) dan New Public Service (NPS), memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika tata kelola rumah sakit daerah. Rumah sakit daerah sebagai salah satu unit pelayanan publik yang kritis merupakan cerminan nyata dari dinamika implementasi administrasi publik di tingkat lokal. RSUD Ali Kasim yang berlokasi di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, hadir sebagai representasi fasilitas kesehatan di daerah yang tergolong dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).Temuan utama mengindikasikan bahwa RSUD Ali Kasim menghadapi tantangan dalam aspek birokrasi pelayanan, akuntabilitas manajerial, dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di daerah terpencil. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara teori administrasi publik dengan praktik nyata di lapangan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan publik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

**Kata Kunci:** *Administrasi Publik, New Public Management, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Gayo Lues*

## PENDAHULUAN

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik pemerintahan telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran paradigma dari model administrasi tradisional menuju pendekatan kontemporer seperti *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS) mencerminkan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, partisipatif, dan responsif (Denhardt & Denhardt, 2015). Di Indonesia, transformasi tersebut semakin penting sejak diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan.

Rumah sakit daerah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan salah satu organisasi publik yang dituntut mampu menerapkan prinsip-prinsip administrasi publik modern. Namun, implementasi berbagai konsep tersebut tidak selalu berjalan optimal, terutama pada rumah sakit yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

Tertinggal). RSUD Ali Kasim di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara konsep administrasi publik yang ideal dengan praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi administrasi publik, tata kelola rumah sakit, maupun kualitas pelayanan kesehatan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada rumah sakit di wilayah perkotaan atau rumah sakit dengan sumber daya yang relatif memadai. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan teori administrasi publik pada rumah sakit daerah di kawasan 3T, khususnya di Kabupaten Gayo Lues, masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada pengukuran kualitas pelayanan atau kepuasan masyarakat, sedangkan analisis mengenai kesesuaian antara perkembangan teori administrasi publik dengan praktik pengelolaan rumah sakit daerah belum banyak dilakukan**.**

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana teori administrasi publik diterapkan dalam pengelolaan RSUD Ali Kasim, mengidentifikasi kesenjangan antara konsep teoretis dengan implementasi empiris, serta merumuskan tantangan dan peluang pengembangan administrasi publik pada rumah sakit daerah di wilayah 3T.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana perkembangan teori administrasi publik yang relevan dengan pengelolaan rumah sakit daerah? (2) Bagaimana aplikasi teori administrasi publik di RSUD Ali Kasim? (3) Apa saja tantangan dan peluang pengembangan administrasi publik di RSUD Ali Kasim?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature study/library research). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang telah terdokumentasi dalam literatur ilmiah (Creswell, 2014). Studi literatur tidak sekadar mengumpulkan dan meringkas referensi, melainkan merupakan proses analitis yang sistematis untuk membangun pemahaman komprehensif tentang suatu fenomena (Snyder, 2019).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber pustaka primer dan sekunder. Sumber primer mencakup artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus, Web of Science, dan SINTA; buku teks administrasi publik dan manajemen kesehatan; serta dokumen kebijakan pemerintah. Sumber sekunder meliputi laporan tahunan RSUD Ali Kasim, dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gayo Lues, dan publikasi Kementerian Kesehatan RI. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci: "public administration theory", "hospital management", "new public management", "healthcare governance", "regional hospital Indonesia", dan kombinasinya (Torraco, 2016).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap: (1) seleksi dan penilaian kualitas sumber literatur berdasarkan relevansi, kebaruan, dan kredibilitas; (2) ekstraksi data tematik dari setiap sumber; (3) sintesis kritis yang menghubungkan temuan-temuan dari berbagai sumber; dan (4) penarikan kesimpulan berbasis bukti literatur. Pendekatan analisis

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Braun & Clarke, 2006). Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data dan konfirmasi silang antar referensi.

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Direktur RSUD Ali Kasim ( menjelaskan tentang kebijakan dan tata Kelola rumah sakit)
2. Kepala Bagian Tata Usaha ( menjelaskan administrasi dan pengelolaan administrasi)
3. Kepala Instalasi (menjelaskan pelaksanaan pelayanan di unit kerja)

**KAJIAN TEORITIS ADMINISTRASI PUBLIK**

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu lahir dari karya Woodrow Wilson (1887) yang berjudul "The Study of Administration". Wilson menekankan pemisahan tegas antara politik dan administrasi (politics-administration dichotomy), di mana administrator publik berperan sebagai implementor kebijakan yang netral dan efisien. Max Weber (1922) kemudian memperkuat fondasi ini dengan konsep birokrasi ideal yang bercirikan hierarki otoritas yang jelas, spesialisasi kerja, aturan dan prosedur formal, serta seleksi berbasis kompetensi (Stillman, 2010).

Dalam konteks rumah sakit pemerintah, model birokrasi Weberian tercermin pada struktur organisasi yang hierarkis dengan direktur, wakil direktur, kepala bidang, hingga unit-unit pelaksana. Sistem kepegawaian berbasis Aparatur Sipil Negara (ASN), prosedur pelayanan yang terstandar (Standar Prosedur Operasional/SPO), serta jalur pelaporan yang formal merupakan manifestasi nyata dari paradigma administrasi klasik ini (Thoha, 2014).

Memasuki era 1980-an, gelombang reformasi administrasi publik yang dikenal sebagai New Public Management (NPM) mengguncang paradigma birokrasi tradisional. NPM yang dipopulerkan oleh Hood (1991) mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam organisasi publik. Karakteristik utama NPM mencakup orientasi pada hasil (output dan outcome), manajemen berbasis kinerja, desentralisasi otoritas manajerial, kompetisi dan privatisasi layanan publik, serta penguatan akuntabilitas (Pollit & Bouckaert, 2011).

Transformasi rumah sakit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan ekspresi paling nyata dari penerapan NPM di Indonesia. Melalui status BLUD, rumah sakit memperoleh fleksibilitas manajerial dalam pengelolaan keuangan, rekrutmen SDM, dan pengadaan barang/jasa, sambil tetap mempertahankan misi pelayanan publik (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005). Penelitian Trisnantoro (2018) menunjukkan bahwa rumah sakit yang telah berstatus BLUD cenderung memiliki kinerja keuangan dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan yang masih beroperasi dalam sistem SKPD konvensional.

Kritik terhadap NPM yang dinilai terlalu mereduksi nilai-nilai publik ke dalam logika pasar mendorong kemunculan paradigma New Public Service (NPS) oleh Denhardt dan Denhardt (2003). NPS menegaskan bahwa administrator publik harus melayani warga

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

negara (citizens), bukan pelanggan (customers). Tujuh prinsip NPS mencakup: melayani warga bukan pelanggan; kepentingan publik adalah tujuan bukan produk sampingan; berpikir strategis dan bertindak demokratis; melayani lebih penting dari mengarahkan; akuntabilitas bukan sesuatu yang sederhana; menghargai orang bukan hanya produktivitas; dan menghargai kewarganegaraan serta pelayanan publik di atas kewirausahaan (Denhardt & Denhardt, 2015).

Dalam pelayanan kesehatan, perspektif NPS menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan layanan kesehatan, transparansi informasi, serta pendekatan yang menghormati martabat dan hak-hak pasien. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip patient-centered care yang semakin diadopsi dalam standar pelayanan rumah sakit modern (Osborne, Radnor, & Nasi, 2013).

Perkembangan terkini dalam teori administrasi publik diwakili oleh konsep Public Governance atau New Public Governance (NPG) yang menekankan jaringan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyediaan layanan publik (Osborne, 2010). Dalam konteks kesehatan, NPG terwujud dalam bentuk kerja sama antara rumah sakit pemerintah dengan BPJS Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal. Teori ini juga relevan dengan konsep collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) yang menekankan pengambilan keputusan bersama antara berbagai pemangku kepentingan.

## HASIL PEMBAHASAN

RSUD Ali Kasim merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Jalan Syuhada, Blangkejeren. Rumah sakit ini berfungsi sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Gayo Lues yang memiliki luas 5.719,58 km² dengan populasi sekitar 95.000 jiwa (BPS Gayo Lues, 2022). Aksesibilitas merupakan tantangan utama, mengingat kondisi geografis pegunungan dan keterbatasan infrastruktur jalan yang menghubungkan kabupaten ini dengan pusat-pusat kota besar seperti Banda Aceh dan Medan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues (2022), RSUD Ali Kasim memiliki kapasitas 100 tempat tidur dengan klasifikasi Rumah Sakit Tipe C. Fasilitas yang tersedia mencakup layanan rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, ruang operasi, laboratorium klinik, dan radiologi. Jumlah tenaga kesehatan mencapai 187 orang dengan komposisi: 12 dokter umum, 4 dokter spesialis, 89 perawat, 24 bidan, 18 tenaga farmasi, dan 40 tenaga kesehatan lainnya.

### Aplikasi Teori Administrasi Publik di RSUD Ali Kasim

*Implementasi Prinsip Birokrasi Weberian*

Struktur organisasi RSUD Ali Kasim mencerminkan model birokrasi hierarkis yang khas. Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang struktur organisasi RSUD, terdapat garis komando yang jelas dari Direktur → Wakil Direktur → Kepala Bidang/Bagian → Kepala Seksi → Staf Pelaksana. Spesialisasi kerja diwujudkan melalui pembagian instalasi fungsional seperti IGD, Rawat Inap, Kamar Operasi, Laboratorium, Farmasi, Rekam Medis, dan Gizi.

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

Namun, penerapan birokrasi di daerah terpencil ini tidak lepas dari disfungsi birokrasi. Penelitian Agus (2020) mengidentifikasi bahwa rumah sakit di daerah 3T sering menghadapi masalah "red tape" atau kerumitan prosedural yang justru menghambat kecepatan pelayanan, khususnya dalam kondisi darurat medis. Ketergantungan berlebihan pada prosedur administratif formal tanpa mempertimbangkan konteks lokal menjadi temuan yang konsisten dalam kajian literatur tentang rumah sakit daerah terpencil.

*Transformasi BLUD sebagai Implementasi NPM*

RSUD Ali Kasim telah menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Penerapan BLUD memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, di mana pendapatan operasional rumah sakit dapat langsung digunakan tanpa harus melalui mekanisme APBD konvensional. Hal ini sejalan dengan prinsip NPM yang menuntut efisiensi dan fleksibilitas manajerial (Hood, 1991).

Namun, studi literatur menunjukkan bahwa implementasi BLUD di rumah sakit daerah terpencil menghadapi tantangan kapasitas SDM dalam perencanaan keuangan berbasis kinerja. Penelitian Mahyudin (2019) tentang BLUD di rumah sakit kabupaten di Aceh menemukan bahwa keterbatasan SDM yang memahami sistem akuntansi dan perencanaan bisnis BLUD menjadi hambatan utama. Banyak pegawai yang terbiasa dengan sistem administrasi keuangan SKPD konvensional mengalami kesulitan adaptasi terhadap fleksibilitas sistem BLUD.

*Orientasi Pelayanan Warga dalam Perspektif NPS*

Prinsip NPS yang menekankan orientasi pada kepentingan warga negara (citizen-centered) relevan diaplikasikan dalam konteks RSUD Ali Kasim. Data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan RSUD Ali Kasim adalah peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) dari kelompok masyarakat tidak mampu. Komitmen rumah sakit daerah untuk tidak menolak pasien dan memberikan pelayanan gratis bagi peserta JKN merupakan manifestasi dari nilai-nilai NPS yang mengutamakan keadilan sosial dalam penyediaan layanan publik (Denhardt & Denhardt, 2015).

Survei kepuasan pasien yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI (2021) terhadap 30 rumah sakit di daerah 3T, termasuk RSUD tipe C di Aceh, menunjukkan bahwa dimensi responsivitas dan empati petugas medis mendapat penilaian yang relatif baik, meskipun dimensi reliability (keandalan fasilitas) dan tangibles (kelengkapan sarana) masih perlu peningkatan signifikan.

**Tantangan Implementasi Administrasi Publik di RSUD Ali Kasim**

**Persoalan Rekrutmen dan Retensi SDM**

Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen rumah sakit di daerah terpencil adalah kelangkaan dan tingginya turnover tenaga kesehatan. Dari perspektif teori administrasi publik, ini berkaitan langsung dengan kapasitas organisasi (organizational capacity) sebagai komponen kunci efektivitas birokrasi (Andrews & Boyne, 2010). Gayo Lues sebagai daerah yang secara geografis terisolir menghadapi kesulitan dalam menarik dokter spesialis dan tenaga medis ahli. Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dan

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

insentif khusus daerah terpencil merupakan upaya pemerintah yang belum sepenuhnya efektif mengatasi persoalan ini (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

**Keterbatasan Teknologi Informasi dan Sistem Manajemen**

Teori administrasi publik kontemporer menekankan pentingnya e-government dan digitalisasi layanan sebagai sarana peningkatan efisiensi dan transparansi (Fountain, 2001). RSUD Ali Kasim, seperti mayoritas rumah sakit di daerah 3T, menghadapi tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang komprehensif. Keterbatasan infrastruktur internet, kurangnya tenaga IT khusus, dan resistensi budaya terhadap perubahan teknologi menjadi hambatan signifikan. Penelitian Satrianegara (2019) menemukan bahwa dari 120 rumah sakit daerah di Indonesia Timur dan daerah terpencil yang disurvei, hanya 34% yang memiliki SIMRS yang berjalan optimal.

**Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola**

Prinsip akuntabilitas dalam administrasi publik menjadi krusial dalam konteks penggunaan anggaran publik untuk operasional rumah sakit. Mengacu pada konsep multi-dimensional accountability yang dikembangkan oleh Mulgan (2000), akuntabilitas rumah sakit daerah mencakup dimensi finansial (pertanggungjawaban penggunaan anggaran), kinerja (pencapaian indikator mutu pelayanan), dan demokratis (pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat). Sistem pelaporan yang belum sepenuhnya transparan dan terbatasnya akses publik terhadap informasi kinerja RSUD Ali Kasim menjadi area yang memerlukan perbaikan serius.

**Peluang Pengembangan Administrasi Publik di RSUD Ali Kasim**

Terlepas dari berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola RSUD Ali Kasim. Pertama, dalam kerangka collaborative governance, kemitraan yang lebih erat dengan Puskesmas sebagai fasilitas primer, BPJS Kesehatan, dan NGO kesehatan dapat memperkuat ekosistem pelayanan kesehatan regional. Kedua, program telemedicine yang digalakkan pasca pandemi COVID-19 membuka peluang bagi RSUD Ali Kasim untuk mengakses konsultasi spesialis jarak jauh, sehingga mengatasi sebagian dari keterbatasan tenaga spesialis lokal (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Ketiga, penerapan prinsip-prinsip co-production dalam NPS melalui pelibatan masyarakat (community engagement) dalam pengelolaan RSUD dapat meningkatkan relevansi layanan dan rasa kepemilikan masyarakat. Program kader kesehatan berbasis desa dan forum konsultasi publik terkait layanan rumah sakit merupakan bentuk konkret co-production yang dapat dikembangkan. Keempat, pemanfaatan dana desa dan alokasi khusus bidang kesehatan dalam kerangka Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan sumber pembiayaan tambahan untuk modernisasi fasilitas dan pengembangan kapasitas SDM (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

Kajian literatur ini memberikan beberapa kesimpulan penting mengenai teori dan aplikasi administrasi publik di RSUD Ali Kasim, Kabupaten Gayo Lues. Pertama, perkembangan paradigma administrasi publik dari model birokrasi Weberian, NPM, NPS, hingga Public Governance memberikan kerangka analitis yang saling melengkapi untuk memahami kompleksitas pengelolaan rumah sakit daerah. Tidak ada satu paradigma pun yang secara tunggal mampu menjelaskan atau meresepkan solusi optimal; pendekatan eklektik yang memadukan elemen-elemen dari berbagai paradigma lebih realistis diterapkan.

Kedua, implementasi administrasi publik di RSUD Ali Kasim menunjukkan pola yang umum ditemukan pada rumah sakit daerah di Indonesia, yakni adanya tension antara kebutuhan fleksibilitas manajerial (tuntutan NPM/BLUD) dengan keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur. Transformasi BLUD yang secara legal telah berjalan belum sepenuhnya diiringi dengan transformasi kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Ketiga, dimensi keadilan sosial dan orientasi pada kepentingan warga yang menjadi inti NPS menemukan relevansinya yang sangat kuat dalam konteks RSUD Ali Kasim sebagai satu-satunya rumah sakit di kabupaten terpencil yang melayani masyarakat dengan mayoritas peserta JKN dari kelompok tidak mampu. Komitmen terhadap nilai-nilai pelayanan publik harus tetap menjadi landasan, bahkan ketika tekanan efisiensi ekonomi menguat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan program peningkatan kapasitas SDM berbasis teori NPM dalam perencanaan bisnis BLUD; (2) pengembangan sistem akuntabilitas publik yang transparan melalui publikasi laporan kinerja yang mudah diakses masyarakat; (3) pengembangan model collaborative governance antara RSUD, pemerintah daerah, BPJS, dan komunitas lokal; serta (4) integrasi program telemedicine sebagai strategi inovatif mengatasi kelangkaan dokter spesialis. Penelitian lanjutan dengan metode survei empiris dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan RSUD Ali Kasim sangat direkomendasikan untuk memvalidasi dan memperkaya temuan studi literatur ini.

## Referensi

Agus, A. (2020). Manajemen pelayanan kesehatan di daerah terpencil: Tantangan dan solusi. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020

Andrews, R., & Boyne, G. A. (2010). Capacity, leadership, and organizational performance: Testing the black box model of public management. Public Administration Review, https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02158.x

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. (2022). Kabupaten Gayo Lues dalam angka 2022. BPS Kabupaten Gayo Lues.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). M.E. Sharpe.
Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues. (2022). Profil kesehatan kabupaten Gayo Lues tahun 2022. Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues.
Fountain, J. E. (2001). Building the virtual state: Information technology and institutional change. Brookings Institution Press.
Hood, C. (1991). A public management for all season Public Administration. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan rumah sakit pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan RI.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Roadmap transformasi sistem kesehatan 2021–2024. Kementerian Kesehatan RI.
Mahyudin. (2019). Implementasi BLUD pada rumah sakit umum daerah di Provinsi Aceh. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.
Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept Public Administration. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218
Osborne, S. P. (2010). The new public governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. Routledge.
Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. The American Review of Public Administration.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (2018). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (2005). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public management reform: A comparative analysis – New public management, governance, and the neo-Weberian state (3rd ed.). Oxford University Press.
Satrianegara, M. F. (2019). Penerapan SIMRS di rumah sakit daerah kawasan timur Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Stillman, R. J. (2010). Public administration: Concepts and cases (9th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
Thoha, M. (2014). Ilmu administrasi publik kontemporer. Kencana Prenada Media Group.
Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. Human Resource Development Review. https://doi.org/10.1177/1534484316671606
Trisnantoro, L. (2018). Manajemen rumah sakit. Gadjah Mada University Press.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). DPR Republik Indonesia.
Weber, M. (1922/1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Trans.). University of California Press.

MIRACLE JOURNAL
e-ISSN 2774 – 4663
Vol 6, No 2, Juli 2026

Wilson, W. (1887). The study of administration. Political Science Quarterly. https://doi.org/10.2307/2139277